



INTISARI

Yugoslavia merupakan negara komunis independen di Eropa Timur yang pernah eksis pada abad ke-20. Sama halnya dengan Indonesia, Yugoslavia menganut politik luar negeri independen, sehingga kedua negara ini menjadi dekat sekaligus membangun Gerakan Non-Blok tahun 1961. Kedua negara ini memiliki hubungan sejarah yang sangat kaya. Sejak awal menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1948 hingga 1965, hubungan kedua negara ini berkembang menjadi sangat intensif, yang didorong oleh kedekatan pandangan politik antara Sukarno dan Josip Broz Tito. Kedekatan tersebut tercermin dalam kerja sama bilateral yang luas, mencakup diplomasi politik, dukungan militer, dan upaya memperkuat hubungan ekonomi di tengah dinamika Perang Dingin.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sejarah diplomasi politik serta kerja sama militer dan ekonomi antara Indonesia-Yugoslavia pada periode 1948 hingga 1965 dari perspektif Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan Sejarah Internasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana Indonesia dan Yugoslavia berinteraksi sebagai dua negara berdaulat dan bekerja sama untuk mewujudkan hubungan bilateral yang independen dari pengaruh blok besar.

Hasil penelitian ini adalah pola hubungan Indonesia-Yugoslavia bermula solidaritas politik yang berkembang menjadi kerja sama praktis. Di bidang politik, Yugoslavia memberikan dukungan diplomatik dan moral bagi perjuangan antikolonialisme di Indonesia untuk peristiwa PRRI/Permesta dan perjuangan Irian Barat. Di bidang militer, penelitian mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan dan kerja sama meliputi pertukaran misi, pelatihan, pengiriman instruktur, hingga pengadaan alutsista. Di bidang ekonomi dan perdagangan, penelitian ini menganalisis dinamika perdagangan bilateral, skema kredit, dan proyek industri yang dikerjakan Yugoslavia di Indonesia.

Kata kunci: **Indonesia-Yugoslavia, hubungan bilateral, politik, militer, ekonomi, non-blok**



ABSTRACT

Yugoslavia was an independent communist state in Eastern Europe that existed throughout the 20th century. Similar to Indonesia, Yugoslavia pursued an autonomous foreign policy, which fostered a close relationship between the two countries and contributed to the founding of the Non-Aligned Movement in 1961. Indonesia and Yugoslavia shared a rich historical relationship. During Indonesia's Guided Democracy era (1959–1965), bilateral relations deepened significantly, driven by the ideological and political affinity between President Sukarno and President Josip Broz Tito. This closeness was reflected in extensive cooperation that encompassed political diplomacy, military support, and efforts to strengthen economic ties amid the broader dynamics of the Cold War.

This research aims to examine the history of political diplomacy, as well as military and economic cooperation, between Indonesia and Yugoslavia during the Guided Democracy period. The study employs historical methods consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. An international historical approach is also used to analyze how Indonesia and Yugoslavia interacted as sovereign states and collaborated to build a bilateral relationship that remained independent of the influence of major geopolitical blocs.

This research finds that the pattern of Indonesia–Yugoslavia relations began with political solidarity and gradually evolved into practical cooperation. Politically, Yugoslavia provided diplomatic and moral support to Indonesia's anticolonial struggles, particularly regarding the PRRI/Permesta rebellion and the West Irian dispute. In the military sphere, the study identifies various forms of cooperation, including mission exchanges, training programs, the deployment of advisors, and defense equipment procurement. Economically, the research highlights the dynamics of bilateral trade, credit arrangements, and industrial projects initiated by Yugoslavia in Indonesia.

Keywords: Indonesia–Yugoslavia, bilateral relations, Guided Democracy, economy, politics